

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep *Collaborative Governance*

1.1 Pengertian *Collaborative*

Collaborative (kolaboratif) yang berarti bekerja sama atau *collaboration* yang berarti kerja sama. Dalam pengertian yang lebih luas *Frans & Bursuck* mendefinisikan kolaboratif sebagai gaya atau cara yang dipilih oleh para profesional untuk pencapaian tujuan bersama. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang terlibat didalam kegiatan kolaboratif memiliki tujuan yang sama, tidak boleh berbeda, sehingga membutuhkan adanya mekanisme perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut secara bersama sehingga tujuan akan dapat dicapai. Hal ini sesuai dengan pendapat *Idol & Baran* yang menyatakan bahwa *in collaborative, planning and implementing are joint effort*. Ini berarti bahwa dalam pelaksanaan kolaboratif yang efektif kegiatan perencanaan dan pelaksanaan merupakan usaha bersama.

Sink Zaenuri menjelaskan bahwa kerjasama kolaboratif sebagai proses diaman oragnisasi-organisasi yang memiliki sebuah kepentingan terhadap masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai jika dilakukan sendiri-sendiri. Hal ini didukung oleh pendapat dari *Fosler* menjelaskan secara lebih spesifik mengenai kerja sama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama

antar pihak yang intensif termasuk adanya usaha secara sadar untuk melakukan alignment dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas.

Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang tidak sama membangun shared vision dan berusaha mewujudkannya secara bersama. Dengan adanya visi yang sama maka setiap komponen memungkinkan untuk berpartisipasi dalam urusan yang disepakati bersama.

Dari konsep kolaboratif yang memungkinkan untuk terjadinya kerjasama diantara ketiga pilar governance karena sudah diyakini adanya visi bersama maka akan semakin menumbuhkan partisipasi yang tinggi pada sektor non pemerintahan. Masyarakat dan pihak swasta memperoleh ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam manajemen urusan-urusan publik.

Sebagian besar pemerintah telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Akan tetapi kerjasama yang dibangun hanya sebatas konvensional, yaitu sebatas pada kerjasama antara pemerintah sebagai pemilik pekerjaan dan lembaga swasta sebagai kontraktor. Kerjasama ini tidak lebih dari transaksi jual beli barang dan jasa antara pemerintah dan pihak swasta.¹

¹ Afdal. 2015. *Collaborative Governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengelolaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu). Hal : 7-8.

Kerjasama yang bersifat jangka pendek dengan intensitas hubungan yang terbatas, sebagaimana diatur dalam kontak. Kemanfaatan kerjasama dihitung sebagai kompensasi atau prestasi dan resiko ditanggung oleh masing-masing pihak. Kalau dilihat dari pola kerjasama tersebut kelihatannya sudah ada kemitraan antara pemerintah dan non pemerintah namun kenyataannya belum ada.

Seharusnya pemerintah lebih memahami kerjasama sebagai kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, masing-masing dari pihak berusaha melakukan inisiasi, penyamaan visi, penyatuan tujuan, strategi dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Meskipun begitu masing-masing pihak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan secara independen. Hubungan yang dibangun dengan masyarakat bersifat kolaboratif, hubungan prinsipal agen tidak akan berlaku karena kerjasama yang terjadi adalah kerjasama antara prinsipal dengan prinsipal.

Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal sekaligus bertindak sebagai agen untuk mereka sendiri. Kemitraan melibatkan dua pihak untuk saling berbagi sumberdaya, resiko, tanggung jawab dan manfaat. Sifat kerjasama seperti ini membuat kemitraan berorientasi pada kepentingan jangka panjang karena memerlukan daya tahan dan interaksi yang cukup tinggi dari kedua pihak.

1.2 Pengertian Governance

Menurut Koiman, *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam

berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme- mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan- perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka.

Governance merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan , mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini governance memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Menurut Mardiasmo, mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut *OECD* dan World Bank Sedarmayanti, *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta pendiptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. ²

² Koiman (2009). Pengertian *Governance* : Gadjah Mada University Press. Hal.17

Menurut Rochman, *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif. Menurut dokumen *United Nation Development Program* (UNDP), tata kelola pemerintahan yang baik adalah “Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Governance* merupakan tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Governance adalah suatu proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor di luar struktur pemerintahan formal, seperti sektor swasta dan masyarakat sipil. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. *Akuntabilitas*, Pemerintah bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan.
- b. *Transparansi*, Pemerintah terbuka dalam memberikan informasi.
- c. *Partisipasi*, Masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

- d. *Keterbukaan*, Pemerintah memberikan informasi yang mudah dijangkau, tepat waktu, dan bebas diperoleh.
- e. *Aturan hukum*, Pemerintah menjalankan disiplin anggaran dan menciptakan legal *and political framework*.
- f. *Responsibilitas*, Perusahaan bertanggung jawab atas tindakannya.
- g. *Independensi*, Perusahaan menjalankan bisnisnya secara independen.
- h. *Kewajaran*, Perusahaan menjalankan bisnisnya secara wajar.

Prinsip-prinsip *governance* ini diterapkan dalam tiga pilar, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

1.3 Pengertian Collaborative Governance

Ansell dan Gash menjelaskan *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik.

Selanjutnya *Ansell & Gash* mengembangkan sebuah model *collaborative governance* dengan dua buah variabel utama, yaitu *Facilitative Leadership* dan *Tourism Design*. Kedua variabel tersebut kemudian terbagi menjadi beberapa sub-variabel.³

³ Ansell Dan Gash (2008), *Collaborative Governance* Dalam Perspektif Administrasi Publik. Program Studi Doctor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas di Ponegoro Press Jalan Erlangga Barat VII NO. 35 Semarang.

1. Variabel Pertama, yaitu *Facilitative Leadership* merujuk pada peran kepemimpinan yang mampu memfasilitasi kolaborasi antar pihak dengan mendorong komunikasi terbuka, membangun kepercayaan, dan memastikan semua pemangku kepentingan merasa didengar serta dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin yang fasilitatif memainkan peran kunci dalam menjaga proses kolaboratif tetap berjalan dengan lancar dan efektif.
2. Variabel Kedua, yaitu *Institutional Design* ini berfokus pada desain institusional yang mendukung kerja sama antar organisasi dan pihak terkait dalam kerangka kolaboratif. Desain ini mencakup aturan, prosedur, dan struktur kelembagaan yang memungkinkan semua pihak untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Desain institusi yang baik harus transparan, inklusif, dan fleksibel agar bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan berbagai pihak.

Dapat dipahami bahwa *Collaborative Governance* merupakan cara pengelolaan “suatu hal” yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik secara langsung, maupun tidak langsung, berorientasi dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Jhon Wanna mendefinisikan kolaborasi sebagai tindakan kelompok kerja yang melibatkan berbagai aktor, individu, grup, atau organisasi yang bersama-sama berusaha mewujudkan tujuan tertentu. Model *Triple Helix* melihat inovasi sebagai hasil dari jaringan kerja sama antara A-B-G (*Academician-Business-Government*), dimana dunia akademik berperan sebagai pemasok knowledge pihak industry

sebagai lokus dari produksi menjadi pemanfaat knowledge, sementara pemerintah bertugas selaku fasilitator yang memungkinkan interaksi stabil antara pemasok dan bertugas selaku fasilitator yang memungkinkan interaksi stabil antara pemasok dan pemanfaat knowledge. Sebuah kolaborasi berhasil dilakukan tidak lepas dengan peran para stakeholder atau di dalamnya.

Peran lain masyarakat yang dapat digali dan dikembangkan adalah pendanaan. Partisipasi dalam pendanaan merupakan potensi internal yang dimiliki oleh masyarakat. Kondisi potensi masyarakat yang akan diintervensi oleh kebijakan adalah untuk pengeralahan dana masyarakat atau yang sering disebut dengan swadaya masyarakat. Peran masyarakat lain yang memiliki posisi yang sangat penting adalah pada pemeliharaan kontrol sosial dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan hasil pembangunan. Diantara masyarakat sendiri hendaknya tumbuh dan mengembangkan sistem kontrol yang sehat dalam masyarakat. Setiap orang akan melakukan aktivitas yang tidak merugikan suatu proses pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta.

Proses dari kolaborasi dilakukan di dalam beberapa tahapan. suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek suatu pengelolaan suatu urusan publik. Meskipun proses kolaboratif sulit untuk dilaksanakan karena karakter-karakter dari setiap stakeholder yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Menurut *Ansell dan Gash* model *Collaborative Governance* merupakan serangkaian komponen-komponen yang berjalan membentuk suatu siklus,

mempengaruhi satu sama lain, dan pada intinya adalah proses collaborative decision-making diantaranya sebagai berikut:

1. Dialog Antar-Muka (*Face-To-Face Dialogue*)

Komunikasi menjadi hal krusial dalam proses kolaborasi, karena adanya orientasi pembentuk konsensus. Komunikasi seringkali terbentuk melalui diskusi langsung (tatap muka) komunikasi yang terbuka selanjutnya mempengaruhi pembentukan kepercayaan antar-aktor.

2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Kegiatan yang terus menerus dilakukan dan perlu ditingkatkan. Membangun kepercayaan merupakan syarat untuk membangun kolaborasi yang solid. Membangun kepercayaan adalah proses yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaborasi.

- a. Komitmen Pada Proses Kolaborasi (*Commitment To The Process*)

Komitmen merupakan komponen penting sekaligus tantangan utama dalam proses kolaborasi. Komitmen dipengaruhi oleh komponen sebelumnya (membangun kepercayaan). Sedangkan faktor (di dalam komponen) yang mempengaruhi adalah adanya mutual *recognition* (mengenal bersama yang bersifat mutual) dan *joint appreciation* (apresiasi bersama) antar aktor. Selain itu, adanya *ownership the process* (rasa memiliki pada proses) yang diwujudkan dengan adanya pengaruh setiap aktor dalam memberi keputusan merupakan pendorong komitmen, namun memiliki dilemma, karena adanya perbedaan dan kompleksitas dalam kolaborasi.⁴

⁴ Anshar, M. Yahya. 2018. Model manajemen BUMDes melalui pendekatan *collaborative governance* sebagai modal sosial ekonomi pembangunan desa di Desa Marta Niaga Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Universitas baturaja. Hlm : 30.

b. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Dalam pengertian ini merupakan *common mission* (misi umum), *common purpose* (tujuan umum), *common objectives* (objektivitas umum) dan *shared vision* (visi bersama). Adanya pemahaman bersama merupakan syarat yang diperlukan selama proses kolaborasi, sehingga tujuan bersama dapat terwujud. Pemahaman yang dimaksud adalah penyatuan tujuan, mendefinisikan permasalahan secara bersama, sehingga meminimalisir terjadinya saling tidak mengerti atau kesalahpahaman.

c. Dampak Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Dampak yang dimaksud adalah yang terjadi selama proses kolaborasi, sehingga ada kata “sementara” di dalamnya. Dampak sementara ini menghasilkan *feedbacks*. Dampak positif lebih diharapkan, sebagai pendorong serta penjaga agar kolaborasi tetap berada pada jalurnya, sehingga disebut dengan “*small-wins*” atau kemenangan kecil.⁵

1.4 Kolaborasi

Ansell and Gash mendefinisikan strategi baru dari pemerintahan yaitu disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. Bentuk dari *governance* yang melibatkan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri, bahwa konsep kolaborasi dengan mengatakan bahwa kerjasama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama antar pihak yang insentif, termasuk adanya upaya secara

⁵ La Ode Syaiful Islamy, *Collaborative Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta:Penerbit Deepublish : 2018), hlm.52.

sadar untuk melakukan alignment dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda

membangun shared vision dan mewujudkannya secara bersama-sama. Untuk itu mereka menyatukan atau setidaknya melakukan aliansi secara vertikal mulai dari sasaran, strategi, sampai dengan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan bersama yang mereka yakini lebih bernilai dari tujuan yang dimiliki oleh masing-masing.

Jonathan menjelaskan kolaborasi sebagai jalan diantara orang-orang yang saling berkelanjutan. Dari penjelasan diatas, pada prinsipnya kolaborasi merupakan bentuk interksi, bekerja bersama, kompromi antara elemen yang saling terkait baik organisasi, pribadi dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memperoleh akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang memulai sebuah proses kolaborasi merupakan cara yang sama, kesamaan pendapat, kemauan untuk berproses, saling menguntungkan, kejujuran, kasih sayang serta berbasis publik. Konsep kolaborasi dipakai untuk mengilustrasikan hubungan kerja sama yang diperbuat pihak-pihak tertentu. Banyaknya penjelasan yang telah dikemukakan dengan sudut yang tidak sama namun didasari prinsip yang sama yaitu kebersamaan, bekerja bersama, membagi tugas, sama rata, dan akuntabilitas. Namun kolaborasi sangat sulit dideskripsikan dalam hal menggambarkan hakikat dari apa yang ada dalam kegiatan ini.

Di pihak lain *Ansell dan Gash* mengemukakan bahwa penjelasan dasar, diambil bahwa *Governance* mengarah pada aturan dan pola yang memandu pengambilan keputusan bersama. Bahwa intinya adalah pada pengambilan keputusan dalam arti

bersama bahwa pemerintah tidak berbicara tentang satu individu yang melahirkan keputusan akan tetapi tentang kelompok individu atau organisasi atau sistem organisasi yang melahirkan keputusan.

Kolaborasi berarti bekerja bersama atau bekerjasama dengan orang lain. Ini menyiratkan aktor individu, kelompok atau organisasi bekerjasama dalam usaha yang sama. Para aktor bekerjasama dengan yang lain dengan syarat dan ketentuan yang seperti kita ketahui dapat sangat bervariasi. Kata “*Collaboration*” pada awalnya digunakan pada abad kesembilan belas ketika perkembangan industrialisasi, organisasi yang lebih kompleks dan pembagian kerja dan tugas meningkat. Ini adalah norma dasar utilitarianisme, liberalisme sosial, kolektivisme, saling membantu dan kemudian manajemen ilmiah dan teori organisasi relasi manusia. Kolaborasi biasanya menarik “putaran” positif. Hal ini sering dilihat sebagai hal yang positif untuk berkolaborasi adalah lebih baik, kreatif, transformasional dan melibatkan hasil yang bermanfaat. Upaya kolaboratif dapat melibatkan pencapaian beberapa hasil atau hasil alternatif, negasi atau pencegahan sesuatu yang terjadi. Kita dapat berkolaborasi untuk tujuan “baik”. Terjadinya kolaborasi adalah penting sebagaimana sarana dan praktik yang terlibat, motivasi yang para pelaku, hasil yang diinginkan dan tujuan yang terlibat.

Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung stakeholder di luar negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan publik dan program-program publik secara cepat.⁶

⁶ Muhammad Idrus (2009), *Kolaborasi Collaborative Governance* (Yogyakarta : CV Budi Utama)

Kolaborasi diartikan sebagai kerjasama antara individu, kelompok atau antar instansi dalam rangka mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai jika dilakukan secara independent. Dalam bahasa Indonesia, sebutan kolaborasi dan kerjasama masih digunakan secara bergantian dan belum terlihat usaha untuk menampilkan perbedaan dan kedalaman makna dalam sebutan tersebut. Secara umum dikenal sebutan kerjasama dibandingkan kolaborasi, dan belum ada pemahaman yang lebih jauh tentang pola yang seharusnya digunakan.

Dalam kerjasama seperti ini, seluruh pihak-pihak yang melibatkan diri dalam kerjasama tetap memiliki otonominya sendiri. Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal dan sekaligus juga bertindak sebagai agen untuk diri mereka sendiri. Mereka sepakat bekerjasama karena memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk diwujudkan secara bersama-sama yang mungkin akan sulit dicapai ketika masing-masing bekerja sendiri.

Strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. Bentuk dari *governance* yang melibatkan sebagai stakeholders atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama. Sejalan dengan pengertian di atas juga menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik.

Beberapa ahli menggambarkan tahapan dari proses kolaborasi. Pendapat Gray dalam Emerson dan Nabatchi memberikan penjelasan mengenai tiga tahapan kolaborasi yaitu masalah pengaturan, penetapan arah serta pelaksanaan. Himmelman dalam Emerson dan Nabatchi, tahapan kolaborasi dipandang sebagai suatu rangkaian strategi yang berkisar untuk merubah masyarakat melalui “*empowerment collaboration*” atau kolaborasi pemberdayaan.

Balogh menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.⁷

Collaborative Governance merupakan usaha serta respon yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik yang terjadi. Dimana dalam penyelesaian masalah publik ini pemerintah harus melakukan kerjasama dengan aktor non pemerintah seperti pihak swasta, masyarakat dan lain-lain.

Tujuan kolaborasi adalah untuk menghasilkan outcome yang diinginkan bersama yang tidak dapat dicapai secara individu atau oleh satu aktor saja. Hal ini dikarenakan, kolaborasi melibatkan aktivitas kooperatif untuk meningkatkan kapasitas diri dan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, CGR harus menghasilkan kapasitas baru bagi masing-masing aktor untuk bertindak bersama yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

⁷ Dimas Luqito Chusumo. Collaborative governance (studi tentang kolaborasi antar stakeholders dalam pengembangan wisata taman jodoh di kabupaten Ogan Komering Ulu). Hlm : 7-8.

2.2 Konsep Pengelolaan Wisata

2.1 Pengeritan Wisata

Menurut *Methiesson* dan *Waill* wisata merupakan pergerakan manusia yang sifatnya hanya sementara ke tujuan-tujuan wisata diluar tempat kerja dan tempat tinggal sehari-hari dimana aktivitasnya dilakukan selama tinggal di tempat tujuan wisata dan untuk itu disediakan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Baiquni wisata dapat dimanfaatkan untuk mendorong perubahan hidup melalui peluang kerja yang tersedia, meningkatkan pendapatan dan membaiknya kualitas hidup masyarakat.

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang wisata halal, wisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, pemerintah aceh, dan pemerintah kabupaten. Wisata halal merupakan kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyediakan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah.

Indikator pariwisata halal meliputi :

1. Destinasi
2. Akademisi
3. Usaha makanan dan minuman.
4. Jasa pelayanan Kesehatan dan kecantikan halal
5. Biro perjalanan.

Sektor wisata merupakan salah satu sektor terbesar di dunia sebagai pembangkit ekonomi, namun keberadaan dari wisata sangat rentan terhadap bencana baik yang disebabkan oleh perilaku manusia maupun bencana yang disebabkan oleh alam. Menurut Henderson pariwisata merupakan industri yang

selalu dihantui oleh bencana dan krisis, bahkan bisa dikatakan sangat rentan karena mudah dipengaruhi oleh perubahan-perubahan maupun kejadian-kejadian yang ada disekelilingnya. Pengelolaan suatu objek wisata merupakan hal terpenting yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu pengelolaan haruslah dirancang secara matang agar tidak hasilnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pembangunan wisata harus melibatkan pemerintah, semua lapisan masyarakat, baik kalangan bawah maupun kalangan atas serta swasta. Semuanya diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata untuk menunjang pembangun wisata. Masyarakat mempunyai dorongan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan apabila mereka mengetahui apa yang perlu mereka bantu dan mengapa harus ikut membantu. Mereka akan tertarik untuk ikut serta menunjang pembangunan wisata apabila mereka telah paham akan mendapatkan manfaat yang positif.

2.2 Jenis dan Macam Wisata

Wisata tidak menggejala sebagai bentuk tunggal. Istilah ini umum sifatnya yang menggambarkan beberapa jenis perjalanan dan penginapan sesuai dengan motivasi yang mendasari kepergian tersebut. Orang melakukan perjalanan untuk memperoleh berbagai tujuan dan memuaskan bermacam-macam keinginan. Di samping itu, untuk keperluan perencanaan dan pengembangan kepariwisataan itu sendiri, perlu pula dibedakan antara wisata dengan jenis wisata lainnya, sehingga jenis dan macam-macam wisata yang dikembangkan akan dapat terwujud seperti yang diharapkan dari wisata itu sendiri. Sebenarnya wisata sebagai suatu gejala, terwujud dalam beberapa bentuk yang antara lain, misalnya:

Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang dibedakan menjadi:

- a. Wisata lokal (*local tourism*), yaitu jenis wisata yang ruang lingkungannya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya kepariwisataan kota Denpasar, kepariwisataan kota Bandung.
- b. Wisata regional (*regional tourism*), yaitu kegiatan wisata yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam ruang lingkup internasional. Misalnya kepariwisataan Bali, Yogyakarta, dan lain-lain.
- c. Wisata nasional (*national tourism*), yaitu jenis wisata yang dikembangkan dalam suatu wilayah negara, dimana para pesertanya tidak saja terdiri dari warga negaranya sendiri tetapi juga orang asing yang berdiam di negara tersebut. Misalnya wisata yang ada di daerah-daerah dalam satu wilayah Indonesia.
- d. Wisata *regional-internasional*, yaitu kegiatan wisata yang berkembang disuatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut, misalnya wisata ASEAN.
- e. Wisata internasional (*international tourism*), yaitu kegiatan wisata yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia.

Menurut objeknya, dimana kegiatan wisata dibedakan menjadi :

1. *Cultural tourism*, yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni dan budaya suatu tempat atau daerah.

2. *Recuperational tourism*, yaitu jenis wisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan penyakit, seperti mandi sumber air panas, mandi lumpur, dan lain-lain.
3. *Commercial tourism*, yaitu jenis wisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional.
4. *Sport tourism*, yaitu jenis wisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga di suatu tempat atau negara tertentu.
5. *Political tourism*, yaitu jenis wisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Misalnya menyaksikan peringatan hari kemerdekaan suatu negara.
6. *Social tourism*, yaitu jenis wisata dimana dari segi penyelenggaraannya tidak menekankan untuk mencari keuntungan, misalnya *study tour*, *picnik*, dan lain-lain.
7. *Religion tourism*, yaitu jenis wisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti upacara Bali Krama di Besakih, haji umroh bagi agama islam, dan lain-lain.

8. *Marine tourism*, merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.⁸

Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan, wisata ini dapat dibedakan menjadi :

- a. *Individual tourism* yaitu seorang wisatawan atau satu keluarga yang melakukan perjalanan secara bersama.
- b. *Family group tourism* yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh rombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain.
- c. *Group tourism* yaitu jenis pariwisata dimana yang melakukan perjalanan wisata itu terdiri dari banyak orang yang bergabung dalam satu rombongan yang biasa diorganisasi oleh sekolah, organisasi, atau tour operator travel agent.

2.3 Unsur-Unsur Wisata

Pada dasarnya bagian-bagian dari gejala wisata terdiri dari tiga unsur :

- a. Manusia (unsur fisik insani sebagai pelaku kegiatan wisata).
- b. Tempat (unsur fisik yang sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri).
- c. Waktu (unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan itu sendiri selama berdiam ditempat tujuan).

⁸ Nanang Fattah, (2004), Jenis-jenis dan macam-macam pengelolaan wisata. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Faktor khas pada umumnya berkaitan dengan maksud bepergian, sifat sementara bepergian tersebut, penggunaan fasilitas wisata, dan yang dianggap paling penting yaitu faktor kenikmatan dan perasaan yang rileks berekreasi.

Kedua faktor terakhir ini bukanlah faktor wisata yang mutlak (*sine qua non*) karena orang yang berpariwisata bisnis (misalnya pelajar) haruslah pula mereka itu tetap dianggap sebagai wisatawan, meskipun dalam beberapa hal kaidah kenikmatan dan rekreasi bukanlah tujuan utama kepergian mereka.

Sisi lain wisata hendaknya dilihat dari sudut pandangan negara penerima wisatawan. Di dalam konteks ini wisata hendaknya dipandang sebagai suatu industri yang turut memberi andil dalam pembangunan sosial ekonomi, baik negara itu sudah maju atau sedang berkembang.

Istilah industri wisata mungkin terasa sebagai sebutan yang agak aneh bagi mereka yang selama ini menganut batasan pengertian *industry* klasik, yang senantiasa berarti suatu proses dengan maksud untuk meningkatkan kekayaan. Struktur industri dapat berbeda menurut hakikat hasil produksinya dan pasaran tempat hasil produksi itu dijual. Juga struktur industri yang dibedakan berdasarkan bahan baku yang dipergunakan dan kondisi tempat bahan itu diolah.⁹

Unsur-unsur wisata yang mutlak sangat menentukan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah unsur pengelolaan dari :

a. Daya tarik wisata (*Attractions*)

Setiap destinasi pariwisata memiliki daya tarik berbeda-beda sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki. *Attractions* atau atraksi adalah produk

⁹ Samsuddin, Saladi, (2006). Unsur-unsur pengelolaan wisata. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

utama sebuah destinasi. Atraksi berkaitan dengan *what to see dan what to do*. Apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di destinasi tersebut. Atraksi bisa berupa keindahan dan keunikan alam, budaya masyarakat setempat, peninggalan bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan. Seharusnya sebuah atraksi harus mempunyai nilai diferensiasi yang tinggi. Unik dan berbeda dari daerah atau wilayah lain.

b. Fasilitas dan jasa pelayanan wisata (*Amenities*)

Amenity atau amenitas merupakan segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum. Kebutuhan lain yang mungkin juga diinginkan dan diperlukan oleh wisatawan, seperti toilet umum, rest area, tempat parkir, klinik kesehatan, dan sarana ibadah sebaiknya juga tersedia di sebuah destinasi. Tentu saja fasilitas-fasilitas tersebut juga perlu melihat dan mengkaji situasi dan kondisi dari destinasi sendiri dan kebutuhan wisatawan. Tidak semua amenitas harus berdekatan dan berada di daerah utama destinasi. Destinasi alam dan peninggalan bersejarah sebaiknya agak berjauhan dari amenitas yang bersifat komersial, seperti hotel, restoran, dan rest area.

c. Keramah tamahan (*Ancillary = hospitality*)

Keramah tamahan berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau orang yang mengurus destinasi tersebut. Ini menjadi penting karena walaupun destinasi sudah mempunyai atraksi, aksesibilitas dan amenitas yang baik, tapi jika tidak ada yang mengatur dan mengurus maka kedepannya pasti akan terbengkalai. Organisasi sebuah destinasi akan melakukan tugasnya seperti

sebuah perusahaan. Mengelola destinasi sehingga bisa memberikan keuntungan kepada pihak terkait seperti pemerintah, masyarakat sekitar, wisatawan, lingkungan dan para stakeholder lainnya.

2.4 Tujuan Pengelolaan Wisata

Pengelolaan suatu objek wisata merupakan hal terpenting yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu pengelolaan haruslah dirancang secara matang agar tidak hasilnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pembangunan wisata harus melibatkan pemerintah, semua lapisan masyarakat, baik kalangan bawah maupun kalangan atas serta swasta. Semuanya diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata untuk menunjang pembangunan wisata. Masyarakat mempunyai dorongan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan apabila mereka mengetahui apa yang perlu mereka bantu dan mengapa harus ikut membantu. Mereka akan tertarik untuk ikut serta menunjang pembangunan pariwisata apabila mereka telah paham akan mendapat manfaat yang positif.

Menurut Darsoprajitno, Tata kelola wisata yang baik merupakan tujuan serta cita-cita dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun swasta agar sector pariwisata dapat semakin maju berkembang pesat. Pengelolaan suatu objek dan daya tarik wisata, memang tak lepas dari semua kegiatan yang dapat mendukung berkembangnya kepariwisataan.

Tujuan umum dari pengelolaan wisata taman jodoh adalah untuk memanfaatkan potensi desa guna meningkatkan perekonomian lokal dan

kesejahteraan masyarakat setempat. Adapun yang menjadi tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui sektor pariwisata. Strategi promosi yang dilakukan oleh pengelola untuk menarik lebih banyak pengunjung, serta memanfaatkan media sosial dan media lainnya.
2. Untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. Pengembangan desa wisata dengan adanya perbaikan fasilitas umum, seperti jalan dan sarana air bersih yang dapat bermanfaat bagi warga setempat.
3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Wisata berbasis masyarakat mendorong warga untuk menjaga kelestarian alam, seperti pengelolaan sampah dan penghijauan kawasan wisata.
4. Untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal. Masyarakat dapat menjaga dan mempromosikan budaya serta tradisi lokal sebagai daya tarik wisata, sehingga meningkatkan identitas dan perekonomian lokal.
5. Untuk mengurangi urbanisasi. Dengan adanya peluang ekonomi di desa, generasi muda tidak perlu merantau ke kota untuk mencari pekerjaan, sehingga dapat mengurangi urbanisasi.

2.3. Kerangka Pikir

Pengertian *Collaborative Governance* adalah suatu proses tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah, swasta, masyarakat sipil, maupun akademisi, dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Proses ini bertujuan untuk mencapai solusi bersama melalui kerja sama yang partisipatif, transparan, dan berbasis konsensus.

Indikator *Collaborative Governance*, adapun indikator *collaborative governance* yaitu berdasarkan Peraturan hukum yang berlaku terkait dengan Pengelolaan wisata bertujuan untuk mengembangkan, mengatur, dan menjaga keberlanjutan sektor Pariwisata. Undang-Undang tentang pengelolaan wisata yaitu Nomor 10 tahun 2009, yakni landasan hukum utama untuk pengembangan pariwisata di Indonesia.

Menurut *Triple Helix* dalam *collaborative governance* (tata kelola kolaboratif) adalah sebuah pendekatan yang mengutamakan sinergi dan kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, dan industri/bisnis untuk mencapai tujuan bersama. Adapun Sinergi dan Kerjasama *Collaborative governance* dalam *Triple Helix* menekankan pentingnya interaksi dan kerjasama aktif antara tiga aktor utama yaitu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan regulator, perguruan tinggi/lembaga riset sebagai pusat pengembangan pengetahuan dan inovasi, dan industri/bisnis sebagai penggerak ekonomi dan penerap inovasi. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih besar daripada yang bisa dicapai oleh masing-masing aktor sendiri. Misalnya, pengembangan produk baru, inovasi teknologi, atau penyelesaian masalah sosial yang kompleks.

Kerangka pikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungan dengan perumusan masalah. Mengacu dalam konsep kolaborasi, bahwa kolaborasi merupakan suatu tindakan untuk menggabungkan semua sektor baik pemerintah maupun non pemerintah

untuk mengelola, mengembangkan, menata dan mengatur semua u
Bersama guna mencapai hasil yang efektif dan efisien.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan tersebut merupakan metode ilmiah yang umum dipakai dan dilaksanakan oleh para peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk ilmu pendidikan, dengan berbagai alasan yang mendasari penggunaannya, salah satunya adalah bahwa penelitian kualitatif mampu memperkaya hasil yang diperoleh dari penelitian kuantitatif; pendekatan kualitatif ini dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman mendalam dan penemuan baru, yang pada dasarnya merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berlandaskan pada metode yang menyelidiki fenomena sosial serta masalah yang berkaitan dengan manusia; dalam konteks penelitian ini, peneliti berusaha membuat gambaran yang kompleks dengan meneliti secara mendetail kata-kata, laporan, serta pandangan dari responden, sekaligus melakukan studi di situasi yang alami guna mendapatkan data yang autentik dan komprehensif. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menyusun gambaran yang kompleks dengan melakukan analisis mendalam terhadap kata-kata, laporan, serta data terinci yang berasal dari pandangan para responden, sekaligus melaksanakan studi langsung dalam situasi yang alami guna memperoleh pemahaman yang autentik dan menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti.

3.2 Fokus Penelitian

1. Model *Collaborative Governance* Teori (Ansell dan Gash)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan *collaborative governance* dalam pengelolaan destinasi wisata Taman Jodoh di Batumarta 2. Dengan menggunakan kerangka teori *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash, fokus penelitian diarahkan untuk memahami sejauh mana kolaborasi antar pihak yakni pemerintah desa, masyarakat lokal, pelaku usaha, dan komunitas pemuda berkontribusi terhadap pengelolaan wisata yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan.

Ansell dan Gash mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan aktor publik dan non-publik dalam forum yang bersifat formal, berbasis konsensus, dan berorientasi deliberatif. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini mengevaluasi enam komponen utama yang menjadi pilar teori Ansell dan Gash, yaitu:

a. Kondisi Awal (*Starting Conditions*)

Mengkaji latar belakang sosial, politik, dan historis pengelolaan Taman Jodoh, termasuk ketimpangan kekuasaan, konflik masa lalu, dan tingkat kepercayaan antar aktor sebelum proses kolaborasi dimulai.

b. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Menganalisis sejauh mana struktur kelembagaan, aturan main, dan

kesepakatan bersama mendukung terciptanya proses kolaboratif yang adil dan efektif.

c. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Mengidentifikasi peran tokoh atau lembaga yang mampu menjadi fasilitator dan jembatan antar pemangku kepentingan, serta dampaknya terhadap efektivitas kolaborasi.

d. Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*)

Menelusuri dinamika interaksi antaraktor dalam bentuk dialog, pertukaran informasi, negosiasi, dan pengambilan keputusan bersama dalam pengelolaan taman wisata.

e. Partisipasi Stakeholder Langsung (*Inclusive Stakeholder*)

Menilai tingkat keterlibatan langsung berbagai pihak, seperti masyarakat lokal, komunitas pemuda, pelaku UMKM, dan pihak swasta, serta meninjau aspek inklusivitas dalam proses tersebut.

f. Kepercayaan dan Komitmen (*Trust, Mutual Understanding, and Commitment*)

Mengevaluasi tingkat kepercayaan, pemahaman bersama, dan komitmen jangka panjang yang dibangun antar pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan wisata.

Selain menganalisis dimensi teoritis dari *collaborative governance* dalam pengelolaan wisata Taman Jodoh, penelitian ini juga secara komprehensif menelaah berbagai bentuk keberhasilan yang telah dicapai maupun tantangan yang dihadapi selama proses kolaborasi berlangsung,

baik yang berkaitan dengan aspek koordinasi antaraktor, dinamika partisipasi masyarakat, hingga keberlanjutan komitmen stakeholder; melalui temuan-temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategis yang aplikatif guna memperkuat sistem tata kelola kolaboratif, meningkatkan efektivitas kemitraan lintas sektor, serta mendorong pengembangan wisata desa berbasis komunitas yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

2. Model Collaborative Governance Teori (Ansel dan Gash)

Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mengevaluasi *collaborative governance* dalam pengelolaan wisata Taman Jodoh di Batumarta 2, dengan menggunakan teori *Triple Helix* sebagai kerangka konseptual. Triple Helix menekankan pentingnya kolaborasi tiga aktor utama yakni pemerintah, sektor swasta, dan akademisi dalam mendorong inovasi dan penguatan tata kelola dalam konteks pengelolaan wisata lokal.

1. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator yang memiliki otoritas kebijakan untuk menciptakan iklim yang mendukung pengembangan wisata, serta menjamin keberlanjutan lingkungan, budaya, dan sosial dalam kawasan tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada sejauh mana pemerintah daerah, baik di level desa maupun kabupaten, telah menginisiasi, mengembangkan, dan mengarahkan kerjasama lintas sektor, serta bagaimana mereka

memediasi dan mengelola hubungan antara aktor-aktor lain dalam sistem kolaboratif.

2. Sektor swasta dalam hal ini mencakup pelaku usaha lokal, pengelola wisata, investor, maupun BUMDes sebagai representasi badan usaha desa. Fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji bentuk-bentuk keterlibatan sektor swasta dalam proses pengelolaan Taman Jodoh, baik dalam aspek finansial, operasional, maupun inovasi pelayanan. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi insentif yang tersedia bagi sektor swasta, serta hambatan yang dihadapi dalam membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan pemerintah dan komunitas.
3. Akademisi atau institusi pendidikan tinggi, berperan sebagai produsen pengetahuan dan inovasi. Fokus penelitian mencakup bagaimana pihak kampus atau akademisi terlibat dalam proses transfer ilmu, pelatihan sumber daya manusia, penelitian terapan, serta pendampingan berbasis data dan riset untuk meningkatkan kualitas tata kelola wisata. Keterlibatan akademisi dinilai dari kontribusinya terhadap peningkatan kapasitas masyarakat lokal, penguatan kelembagaan, dan pengembangan strategi berbasis potensi lokal yang adaptif terhadap dinamika pariwisata modern.

Selain memetakan peran dan kontribusi masing-masing aktor dalam kerangka *Triple Helix*, penelitian ini juga memfokuskan diri pada proses interaksi dan mekanisme koordinasi antara ketiga aktor tersebut. Bagaimana bentuk forum kolaboratif dibangun, sistem pengambilan

keputusan dijalankan, dan nilai-nilai kebersamaan dijaga akan menjadi fokus krusial untuk memahami kedalaman *collaborative governance* yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian juga diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi tata kelola kolaboratif di tingkat lokal. Dinamika kekuasaan, ketimpangan sumber daya, kurangnya kapasitas kelembagaan, serta potensi konflik kepentingan menjadi elemen yang perlu dikaji secara mendalam guna menemukan pola hubungan yang efektif dan inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi penguatan *collaborative governance* berbasis *Triple Helix*, yang relevan dengan konteks lokal Batumarta 2, dengan menekankan pada pentingnya sinergi antaraktor, pemberdayaan masyarakat, inovasi kebijakan, dan keberlanjutan lingkungan. Melalui pemahaman yang menyeluruh terhadap dinamika kolaborasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan model tata kelola wisata yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan di kawasan perdesaan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lokasi ini dipilih berdasarkan beberapa faktor antara lain sebagai berikut: Pertama, karena wisata Taman Jodoh memiliki keindahan alam yang membuat banyak wisatawan yang berkunjung hanya saja belum dikelola sepenuhnya dengan baik. Kedua, karena Desa Marta Niaga sudah termasuk salah satu desa wisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3.4 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu: *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Wisata Taman Jodoh Di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan penulis dari buku-buku, beberapa dokumen berupa laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan aspek-aspek keberhasilan pemerintah dalam mengelola wisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, manusia merupakan instrumen utama dalam penelitian. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif maka seorang peneliti membutuhkan seorang informan yang memiliki pengetahuan tentang data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Artinya orang yang dijadikan informan dalam penelitian tersebut dianggap paling tau dan mengerti tentang apa yang menjadi objek penelitian.

Peneliti telah menetapkan informan dalam pelaksanaan penelitian ini dengan urutan informan yaitu :

Tabel 2.2 : Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Wardi Kusuma	Kepala Desa Batumarta II
2.	Ade Putra	Sektor Swasta
3.	Herni Ramayanti,M.S.i	Akademisi

Sumber Data : Data dioleh peneliti tahun 2025

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data ini diharapkan agar saling melengkapi sehingga informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian.¹⁰

a. *Observasi* (pengamatan langsung)

Yaitu pengumpulan data yang didapatkan dengan cara pengamatan langsung ditempat dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan kolaborasi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam pengelolaan Wisata Taman Jodoh.

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara dilakukan dengan pihak Ketua BUMDes, Sekretariat BUMDes, Kepala Desa, Masyarakat dan Pengunjung, secara terstruktur. Kegiatan wawancara terstruktur ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan. Wawancara adalah pengumpulan data

¹⁰ Abdussamad, Zuchri (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar : CV Syakir Media Press.

dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada informan dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara berstruktur yaitu pertanyaan telah dirumuskan sebelum berhadapan dengan informasi, agar bahan pengolahan data dapat lebih mudah. Selain ini peneliti juga akan menggunakan metode wawancara tak berstruktur berguna untuk memahami karakter asli sebuah komunitas sosial karena jabatan akan lebih terbuka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang diambil dari beberapa buku bacaan maupun dokumen dan yang lainnya berhubungan dengan objek penelitian di lokasi penelitian untuk melengkapi data tentang aspek-aspek keberhasilan pemerintah dalam mengelola pariwisata Taman Jodoh Di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dilakukan setelah semua data primer dan sekunder terkumpul, yang kemudian diolah kembali oleh penulis. Analisis berarti mengolah data, mengorganisasir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Dengan kata lain data mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata taman jodoh yang sudah dikumpulkan secara keseluruhan ditarik kesimpulannya secara general. Data tersebut menjawab semua rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal dan juga merupakan temuan baru yang sebelumnya belum diketahui.

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang dikumpulkan sehingga data tersebut dapat ditemukan kesimpulan dan dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu data yang diperoleh dikembangkan melalui pola hubungan tertentu. Menurut Miles dan Huberman (dalam buku Sugiyono) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu dengan tahapan pengumpulan data.

1. Pengumpulan Data (*Data Collecting*) merupakan tahap pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Makin lama dilapangan makin banyak jumlah data yang di dapatkan dan semakin bervariasi. Terdapat data yang dapat diamati dan data yang tidak dapat diamati misalnya mengenai perasaan dan hati.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*) yaitu memilih dan memfokuskan yang penting dan merangkum data yang pokok. Di dalam reduksi data, laporan-laporan lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan baku mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan

gambaran yang lebih tajam guna mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperoleh bila diperlukan reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3. Penyajian Data (*Data Display*) menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Agar peneliti tidak tenggelam oleh kumpulan data oleh karena itu agar dapat melihat gambar keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian ini, harus diusahakan membuat alat ukur yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi.
4. Penarikan Kesimpulan (Klasifikasi Data) sejak awalnya peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu peneliti mencari tema, pola hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya. Jadi data yang diperoleh dari pihak sejak awal mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan yaitu akan lebih tetap lengkap jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasikan selama penelitian berlangsung hingga akhir tercapai kesimpulan terakhir.

3.7 Keabsahan Data

Menurut Sugiyono, data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

Triangulasi, pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan banyak waktu. Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada pada kantor pemerintah dan lokasi objek wisata terkait *Collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja, sehingga data yang diperoleh terpenuhi.

Dengan menerapkan langkah-langkah strategis yang telah dijabarkan sebelumnya secara terencana, bertahap, dan konsisten, diharapkan pengelolaan Wisata Taman Jodoh dapat terlaksana secara lebih efektif,

efisien, dan adaptif terhadap dinamika di lapangan melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif, yakni dengan melibatkan secara aktif berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam aktivitas wisata, pemerintah daerah sebagai fasilitator regulasi dan kebijakan, pelaku usaha sebagai mitra ekonomi dan investasi, serta komunitas pariwisata sebagai penggerak sosial dan budaya, dalam setiap tahapan penting mulai dari perencanaan awal, pelaksanaan program, pengawasan terhadap kegiatan wisata, hingga evaluasi berkala terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pariwisata tersebut.

Pendekatan ini menjadi sangat penting dalam konteks Taman Jodoh, mengingat lokasi ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang wisata dan rekreasi, tetapi juga sebagai ruang sosial masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan tersebut, sehingga aspek keberlanjutan menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan aktivitas pengelolaan. Partisipasi masyarakat lokal, misalnya, harus ditingkatkan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek aktif yang turut merancang konsep wisata berbasis potensi lokal, menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan, serta mengelola usaha mikro yang menunjang kegiatan wisata, seperti kuliner, kerajinan tangan, dan jasa pemandu lokal.

Demikian pula, keterlibatan pemerintah daerah harus lebih dari sekadar memberikan izin atau dana, melainkan juga mencakup fungsi pembinaan, penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur dasar yang

memadai (seperti akses jalan, sanitasi, dan pencahayaan), serta penyusunan regulasi yang mendorong praktik pariwisata yang berwawasan lingkungan dan inklusif. Di sisi lain, pelaku usaha dapat memberikan kontribusi dalam bentuk investasi ramah lingkungan dan kemitraan dengan komunitas lokal melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sementara komunitas pariwisata dapat membantu mempromosikan Taman Jodoh melalui berbagai platform digital, menyelenggarakan kegiatan budaya, dan menciptakan ruang edukatif bagi wisatawan agar memahami nilai-nilai lokal yang ada.

Melalui integrasi dan sinergi dari seluruh elemen tersebut, akan terbentuk suatu model pengelolaan destinasi wisata yang tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan semata, tetapi juga mengedepankan kualitas pelayanan, kelestarian lingkungan, keberdayaan masyarakat lokal, serta nilai-nilai budaya yang menjadi identitas kawasan tersebut. Hal ini sangat krusial untuk menghindari praktik pengelolaan wisata yang bersifat eksploitatif atau jangka pendek, yang justru dapat merusak ekosistem sosial dan alam yang menjadi daya tarik utama dari Taman Jodoh.

Oleh karena itu, apabila seluruh langkah strategis yang telah dirumuskan sebelumnya mampu dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur masyarakat lokal, pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun komunitas pariwisata, dengan didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi yang

sistematis, transparan, serta responsif terhadap berbagai dinamika dan masukan dari lapangan, maka pengelolaan Wisata Taman Jodoh tidak hanya akan mampu menghasilkan tata kelola destinasi wisata yang lebih efektif dan adaptif, tetapi juga akan memberikan manfaat yang maksimal secara menyeluruh, yaitu dari sisi ekonomi melalui peningkatan pendapatan masyarakat setempat, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berorientasi pada potensi lokal; dari sisi sosial melalui penguatan identitas budaya lokal, pemberdayaan komunitas, peningkatan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, serta terciptanya harmoni sosial yang mendukung stabilitas dan keberlanjutan pengelolaan kawasan; serta dari sisi lingkungan melalui pelestarian ruang terbuka hijau, pengendalian dampak ekologis, penerapan prinsip wisata hijau (eco-tourism), pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta edukasi lingkungan kepada wisatawan dan masyarakat, yang keseluruhannya bermuara pada terwujudnya Taman Jodoh sebagai model destinasi wisata yang tidak hanya menarik secara estetika dan rekreatif, tetapi juga memiliki nilai keberlanjutan yang kuat, mampu mempertahankan daya tariknya dalam jangka panjang, dan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi tanpa mengorbankan hak generasi mendatang untuk menikmati manfaat yang sama atau bahkan lebih baik dari sumber daya yang ada saat ini.